

## **ANALISIS IMPLEMENTASI ASAS KESEIMBANGAN DALAM KONTRAK BAGI HASIL GROSS SPLIT MINYAK DAN GAS BUMI DI INDONESIA**

### **INTISARI**

**Rani Fadhila Syafrinaldi<sup>1</sup>, Taufiq EL Rahman<sup>2</sup>**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi dari asas keseimbangan dalam kontrak bagi hasil gross split minyak dan gas bumi di Indonesia. Berangkat dari argumentasi awal bahwa skema Gross Split ini membuat kontrak kerja sama minyak dan gas bumi menjadi kurang tepat mengingat posisi tawar kontraktor menjadi lebih rendah dan terjadi posisi yang tidak seimbang antara SKK MIGAS dan Kontraktor. Penelitian ini juga bertujuan untuk menjawab dua masalah hukum yang diangkat oleh Penulis. **Pertama**, bagaimana implementasi asas keseimbangan pada skema Gross Split dalam Kontrak Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi di Indonesia. **Kedua**, Faktor-Faktor Pendukung Apakah Yang Dapat digunakan untuk pencapaian tujuan asas keseimbangan dalam kontrak bagi hasil gross split?

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dimana penelitian dilakukan dengan cara meneliti data sekunder yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier. Kemudian, data tersebut di atas akan dianalisis secara deskriptif untuk menjawab rumusan masalah.

Hasil penelitian bahwa asas keseimbangan kurang mendapat tempat di dalam kontrak bagi hasil gross split karena posisi yang tidak seimbang dilihat dari hak dan kewajiban para pihak. Hal ini dikarenakan kontraktor wajib menanggung segala biaya operasi perminyakan yang merupakan bukti bahwa kewajiban yang ditanggung oleh Kontraktor sangat berat dengan tiadanya *cost recovery*. Selanjutnya, faktor penggantian sebagian dari biaya operasi melalui pembayaran pajak dan pemutusan kontrak setelah lewat waktu lima tahun dapat mengurangi kerugian yang lebih besar lagi bagi Kontraktor jika produksi komersial tidak tercapai sehingga menjadi pendukung tercapainya asas keseimbangan dalam kontrak ini. Selain itu, Kontraktor juga berhak mengakhiri perjanjian setelah melampaui waktu lima tahun sejak tanggal efektif berlakunya kontrak dengan tujuan untuk menghindari kerugian yang lebih besar lagi yang akan ditanggung oleh Kontraktor.

**Kata Kunci:** kontrak bagi hasil, gross split, asas keseimbangan

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

<sup>2</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

## **ANALYSIS OF IMPLEMENTATION OF EQUITABILITY PRINCIPLE IN AN OIL AND GAS GROSS SPLIT PRODUCTION SHARING CONTRACT IN INDONESIA**

### **ABSTRACT**

**Rani Fadhila Syafrinaldi<sup>3</sup>, Taufiq EL Rahman<sup>4</sup>**

*This research aims to determine and analyze the implementation of the principle of equity in the contract for the gross split of oil and gas in Indonesia. Departing from the initial argument that the Gross Split scheme made the oil and gas cooperation contract less precise considering the contractor's bargaining position was lower and there was an imbalance between SKK MIGAS and the Contractor. This study also aims to answer two legal problems raised by the author. First, how to implement the balance principle in the Gross Split scheme in the Oil and Gas Production Sharing Contract in Indonesia. Second, what supporting factors can be used to achieve the objective of the balance principle in the gross split profit sharing contract?*

*This research is a normative legal research in which the research is carried out by analyzing secondary data that were obtained through library research using primary law, secondary law, and tertiary law. Moreover, those aforementioned data were analyzed using descriptive method in order to obtain answers for the legal problems.*

*The outcomes of this research are that the equitability principle does not hold a big role for the gross split scheme due to the fact there are imbalance of positions of both parties as can be seen from the rights and obligations of the said parties. This is due to the fact that Contractor has to bear all the necessities of the operating costs. The tax reimbursement from the operation cost through tax payment is able to fill the loss suffered by the contractor in case commercial production is not achieved. Furthermore, Contractor is allowed to end the contract to avoid bigger loss towards the contractor.*

*Keywords: production sharing contract, gross split, equity*

---

<sup>3</sup> Student of Masters of Law Program at Postgraduate Departement, Faculty of Law, Gadjah Mada University, Yogyakarta

<sup>4</sup> Lecturer of Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta



UNIVERSITAS  
GADJAH MADA

**ANALISIS IMPLEMENTASI ASAS KESEIMBANGAN DALAM KONTRAK BAGI HASIL GROSS SPLIT  
MINYAK DAN GAS BUMI DI  
INDONESIA**

RANI SYAFRINALDI, production sharing contract, gross split, equity  
Universitas Gadjah Mada, 2020 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>